



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMA SETYAWATI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **19939**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 27.028.220.000

1. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.224.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.932.400.000
3. Tanah Seluas 26 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 159.120.000
4. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
6. Bangunan Seluas 49 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.268.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.352.500.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.710.000.000
11. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
12. Tanah Seluas 1.876 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL



SENDIRI Rp. 1.313.200.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.265.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.067.000.000

15. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

16. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

17. Tanah Seluas 59 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

18. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 670.500.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 988.500.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.523.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 899.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 4X4 2.4 VRZ AT DIESEL TRD
Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000

2. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E SE CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 299.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 12 E CVT CKD Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.575.626.347

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 33.102.846.347

III. HUTANG Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

33.102.846.347

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.